



## **Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magetan**

**Ninik Muryati**  
**Haris Wibisono**  
**Mujilan**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun  
ninikmuryati.arshaka@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to discover the influence of the attitude of tax payer toward tax payer compliance in Magetan. The result of this study can give the benefit and input for relevant agencies and other researchers. The population of this study were the PBB tax payer which registered on the Register of Tax Assessment Association Magetan 2013. Sum of the sample were 105 respondents which distribute in 18 districts. The quality test of data using validity and reliability test. Data analysis technique using classical assumption (normality test, autocorrelation, multicollinearity test, heteroscedasticity test), test hypotheses (t test and F test). This study found evidence that the attitude of tax payer towards regional development priority, the attitude of tax payer on the implementation of PBB fines, the attitude of tax payer towards fiscus service have significant effects on the tax payer compliance in Magetan. However, the attitude of tax payer that the evasion on the PBB has been common has no effect on the tax payer compliance in Magetan.*

**Key words:** *tax payer, tax compliance, the attitude of tax payer*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu pendukung keberhasilan perpajakan adalah faktor *tax payer*. Faktor *tax payer* merupakan faktor yang melekat pada wajib pajak. Adapun Faktor *tax payer* yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, (2) Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB, (3) Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, (4) Sikap wajib pajak terhadap penghindaran PBB telah umum. Bagi Dirjen Pajak *tax payer* merupakan faktor yang bersifat *uncontrollable*, yaitu faktor yang tidak bisa dikendalikan karena melekat pada diri wajib pajak. Jadi sangat jelas bahwa sikap wajib pajak sangat berperan penting bagi keberhasilan Perpajakan (Kahono, 2003).

Meskipun telah diterapkan sistem reformasi pajak yang baru, tetapi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selalu berada dibawah pokok ketetapan (Wulandari, 2010). Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak atas pentingnya pajak yang dibayarkan untuk pembiayaan pembangunan, pemahaman dan kemampuan wajib pajak yang rendah. Pada dasarnya tidak ada masyarakat yang rela untuk membayar pajak. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang cukup baik tentang pajak, sehingga masyarakat akan rela untuk membayar pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa Sikap WP terhadap prioritas pembangunan, Sikap WP terhadap sanksi denda PBB, Sikap WP terhadap

pelayanan, dan Sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kabupaten Magetan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan sistem pemungutan yang diterapkan pada Perpajakan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Salah satu pajak dalam negeri yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Meskipun memiliki nilai rupiah relatif kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai dampak yang luas, sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

### **Sikap Wajib Pajak**

Sikap merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap memiliki tiga komponen, yaitu pengertian (*cognition*), keharuan (*affect*), dan perilaku (*behavior*) (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku, seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku (Mustikasari, 2007).

### **Sanksi Denda PBB**

Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

### **Pelayanan Fiskus**

Fiskus merupakan aparat pemungut pajak yang mempunyai wewenang dan kewajiban. Kewajiban umum keutamaan dari aparat pajak (fiskus) adalah memberikan bimbingan, penerangan, penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangann perpajakan yang berlaku (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

### **Pengaruh Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Kepatuhan WP dalam Pembayaran PBB**

Hasil penerimaan PBB dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah yang bersangkutan. Karena terbatasnya dana, maka pembangunan infrastruktur tersebut dikerjakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan. Soetrisna (1994) dalam Kahono (2003), mengatakan bahwa layanan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi pembayaran PBB, khususnya wajib pajak PBB perkotaan. Untuk itu sikap WP dalam memandang prioritas pembangunan daerahnya diduga akan berpengaruh dalam kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya PBB. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PB.

### **Pengaruh Sikap WP terhadap Sanksi Denda PBB terhadap Kepatuhan WP dalam Pembayaran PBB.**

Setiap peraturan pasti ada sanksi yang diperkenankan, supaya peraturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Denda PBB berlaku jika WP tidak melaksanakan pembayaran PBB-nya dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu sikap atau pandangan masyarakat terhadap sanksi denda PBB diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

### **Pengaruh Sikap WP terhadap Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan WP dalam Pembayaran PBB.**

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kemauan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajaknya (Kahono, 2003). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

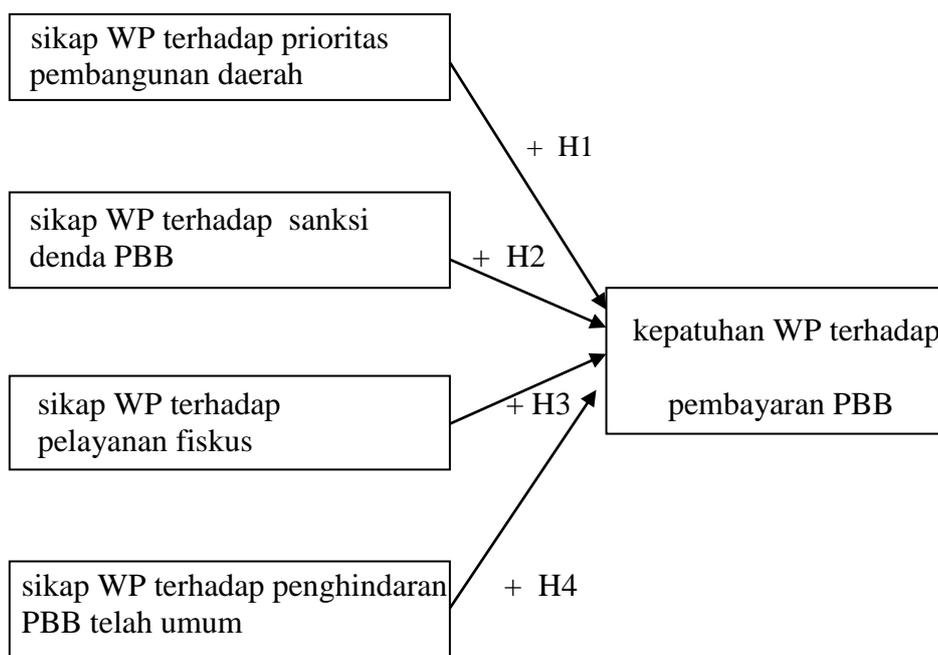
H3: sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP terhadap pembayaran PBB.

### **Pengaruh Sikap WP bahwa Penghindaran PBB telah Umum terhadap Kepatuhan WP dalam Pembayaran PBB.**

Tidak adanya keadilan perpajakan ditunjukkan dengan adanya penghindaran dan pembangkangan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak termasuk PBB. Penghindaran pajak oleh wajib pajak pada saat ini telah umum terjadi. Banyak kelemahan Undang-undang yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang ingin menghindari kewajiban hukumnya. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4: sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

### **Kerangka Konseptual dan Model Penelitian.**



## METODE PENELITIAN

### Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar PBB di wilayah Magetan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi PBB yang terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP tahun 2013) di Kabupaten Magetan sebanyak 150 WP. Penentuan sampel menggunakan metode *systematic sampling* dan *berteknik a systematic sample with a random start* – nya Babbie, Earl (1983) dalam Kahono (2003) dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{Npq}{(N - 1) * D + pq}$$

Dimana :

D	=	$\frac{B^2}{4}$
n	=	jumlah sampel yang diinginkan
N	=	Populasi
p	=	oleh karena proporsi awal tidak diketahui maka untuk meminimalkan risiko <i>sampling error</i> dipakai $p = 0,5$
q	=	$(1 - p) = 0,5$
B	=	<i>Bound of error</i> atau kelonggaran kesalahan. Diperkirakan berinterval <i>range</i> tidak lebih Dari 10% atau 0,1.
D	=	$(0,1 * 0,1) : 4 = 0,0025$ .

### Variabel penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Kepatuhan WP adalah sikap WP terhadap peraturan perpajakan khususnya PBB. Sikap tersebut seperti kesediaan WP mengurus dan mengisi SPOP dengan benar, membayar PBB tepat pada waktunya (Kahono, 2003). Sikap WP ini diukur dengan instrumen dari Kahono (2003) menggunakan skala likert dengan 5 pernyataan. tentang kepatuhan wajib pajak PBB yang ditanyakan kepada responden.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum.

### Definisi Operasional Variabel

*Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah*

Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah adalah sikap atau konstelasi komponen yang berinteraksi antara pemahaman, perasaan dan perilaku terhadap makna dan fungsi prioritas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah (Kahono, 2003). Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 6 pernyataan.

*Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB*

Sikap WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB adalah sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap responden sendiri dan orang lain di sekitar responden (Kahono, 2003). Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 4 item pernyataan.

*Sikap WP terhadap pelayanan fiskus*

Sikap WP terhadap pelayanan fiskus adalah sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus yang sesungguhnya terjadi (Kahono, 2003). Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 5 item pernyataan.

*Sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum*

Sikap WP terhadap penghindaran telah umum adalah sikap responden tentang telah umum atau tidaknya penghindaran pajak PBB di sekitar responden (Kahono, 2003). Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 5 item pernyataan.

### Teknik Analisis

Jenis penelitian ini menggunakan analisis hipotesis. Tipe investigasi yang digunakan adalah hubungan kausal yaitu menguji pengaruh variabel-variabel independen yaitu sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Unit analisis adalah individual yaitu WP PBB. Ruang lingkup penelitian adalah lapangan.

Persamaan regresi pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Keterangan : Y : Kepatuhan WP dalam pembayaran PBB  
 a : Konstanta  
 b1, b2, b3, b4 adalah koefisien regresi variabel x1 , x2, x3, x4  
 x1 : Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah  
 x2 : Sikap WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB  
 x3 : Sikap WP terhadap pelayanan fiskus  
 x4 : Sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum  
 e : Residual

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Data Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dapat dideskripsikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Y	105	5	25	19.15	4.731
X1	105	6	30	23.93	5.666
X2	105	4	20	14.51	3.979
X3	105	5	25	19.37	4.650
X4	105	5	25	17.22	5.906

Hasil untuk variabel sikap WP terhadap kepatuhan WP dalam pembayarn PBB (Y) menunjukkan bahwa WP PBB di Kabupaten Magetan memiliki kepatuhan yang baik dalam pembayaran PBB. Hasil untuk sikap WP terhadap prioritas pembangunan (X1) menunjukkan bahwa prioritas pembangunan fasilias umum daerah Kabupaten Magetan berjalan secara lancar. Hasil untuk sikap WP terhadap sanksi denda (X2) menunjukkan bahwa sanksi denda PBB di Kabupaten Magetan telah diterapkan secara baik. Hasil untuk sikap WP terhadap pelayanan fiskus (X3) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus di Kabupaten Magetan sangat baik. PBB. Hasil untuk sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum (X4) menunjukkan bahwa sikap menghindar dalam pembayaran PBB di Kabupaten Magetan tidak umum terjadi.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Dari hasil uji validitas diketahui bahwa semua pertanyaan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Sehingga semua item pertanyaan kuesioner dinyatakan valid. Dari hasil uji reliabilitas diketahui nilai Cronbach Alpha semua variabel > 0,60, ini menunjukkan semua variabel adalah handal (*reliable*).

**Uji Asumsi Klasik***Uji Normalitas***Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.33972148
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.061
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.990
Asymp. Sig. (2-tailed)		.280

a. Test distribution is Normal.

a. Calculated from data.

Dari hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa semua data berdistribusi normal.

*Uji Multikolinearitas***Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.213	1.141		1.063	.291		
	X1	.188	.061	.225	3.103	.002	.464	2.153
	X2	.584	.111	.492	5.268	.000	.281	3.560
	X3	.258	.075	.254	3.428	.001	.446	2.245
	X4	-.003	.063	-.004	-.046	.963	.396	2.524

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa keempat variabel bebas dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

*Uji Autokorelasi***Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

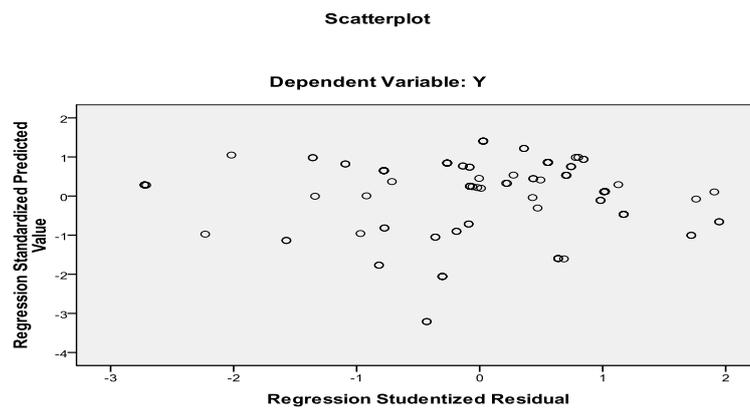
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.869	.755	.746	2.386	1.809

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasar hasil uji autokorelasi didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 1,809. Nilai tabel Durbin-Watson dengan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 105 diketahui nilai batas bawah (dl) = 1,59 dan batas atas (du) = 1,76. Karena nilai DW terletak antara batas atas (du) dan 4-du (1,76 < 1,809 < (4 - 1,76)), maka dinyatakan model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 1. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas terlihat bahwa sebaran yang terjadi tidak memiliki pola tertentu. Oleh sebab itu model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### Persamaan Regresi

**Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.213	1.141		1.063	.291
X1	.188	.061	.225	3.103	.002
X2	.584	.111	.492	5.268	.000
X3	.258	.075	.254	3.428	.001
X4	-.003	.063	-.004	-.046	.963

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,213 + 0,188X_1 + 0,584X_2 + 0,258X_3 - 0,003X_4$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

Nilai konstanta regresi adalah 1,213. Hal ini berarti apabila semua variabel independen bernilai konstan, maka besarnya nilai kepatuhan WP dalam pembayaran PBB adalah 1,213.

Koefisien sikap WP terhadap prioritas pembangunan (X1) sebesar 0,188, berarti setiap penambahan sikap WP terhadap prioritas pembangunan sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan WP dalam pembayaran PBB sebesar 0,188. Nilai t hitung sebesar 3,103 dengan tingkat signifikansi 0,002, berarti secara individual sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

Koefisien sikap WP terhadap sanksi denda PBB (X2) sebesar 0,584 berarti bahwa setiap penambahan sikap WP terhadap sanksi denda sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan WP dalam pembayaran PBB sebesar 0,584. Nilai t hitung sebesar 5,268 dengan tingkat signifikansi 0,000, berarti secara individual sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

Koefisien sikap WP terhadap pelayanan fiskus (X3) sebesar 0,258 berarti bahwa setiap penambahan sikap WP terhadap pelayanan fiskus sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan WP dalam pembayaran PBB sebesar 0,258. Nilai t hitung sebesar 3,428 dengan tingkat signifikansi 0,002, berarti secara individual sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

Koefisien sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum (X4) sebesar -0,003 berarti bahwa setiap penambahan sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum sebesar satu satuan akan mengurangi kepatuhan WP dalam pembayaran PBB sebesar 0,003. Nilai t hitung sebesar -0,046 dengan tingkat signifikansi 0,963, berarti secara individual sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

#### Koefisien Determinasi

**Tabel 6. Koefisien Determinasi**

Model	R	.755	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 <sup>a</sup>	.755	.746	2.386

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,746, berarti sebesar 74,6% kepatuhan WP dalam pembayaran PBB dipengaruhi oleh sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum. Sedangkan sisanya sebesar 25,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

#### Uji signifikan simultan (uji statistik F)

**Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan ANOVA**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1758.235	4	439.559	77.207	.000 <sup>a</sup>
Residual	569.327	100	5.693		
Total	2327.562	104			

Berdasarkan hasil uji F diketahui nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05, berarti sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis tersebut di atas, maka dilakukan pembahasan sebagai berikut:

*H1: Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB*

Dari hasil analisis regresi linier disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini berarti bahwa sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kabupaten Magetan. Hal ini dapat dimengerti karena WP telah membayarkan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan imbalan berupa pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan lain-lain.

*H2: Sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB*

Dari hasil analisis regresi linier disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini berarti bahwa sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kabupaten Magetan. Hal ini bisa diterima sebab masyarakat selaku wajib pajak akan mematuhi pembayaran PBB jika memandang bahwa sanksi denda akan lebih merugikan.

*H3: Sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB*

Dari hasil analisis regresi linier disimpulkan H3 diterima. Hal ini berarti bahwa sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kabupaten Magetan. Hal ini dapat diterima karena jika fiskus tidak memberikan pelayanan yang baik kepada WP, maka ada kemungkinan WP akan melalaikan kewajibannya dalam membayar PBB. Demikian juga sebaliknya.

*H4: sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB*

Dari hasil analisis regresi linear disimpulkan maka H4 ditolak. Hal ini berarti bahwa sikap WP bahwa penghindaran PBB telah umum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kabupaten Magetan. Kemungkinan sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB karena dipengaruhi oleh tata cara pembayaran PBB terutama di Kabupaten Magetan dimana SPPT dibagikan oleh ketua RT/perangkat desa sekaligus menagih pembayaran PBB. Hal ini menjadikan WP akan taat dan patuh dalam pembayaran PBB.

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB dan sikap WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kabupaten Magetan. Namun sikap WP terhadap penghindaran PBB telah umum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB di Kabupaten Magetan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengambil data di Kabupaten Magetan, sehingga lingkup penelitian masih terlalu sempit. Oleh sebab itu hasil penelitian tidak dapat di generalisasikan untuk kota-kota lain di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 4 variabel. Adapun saran untuk penelitian berikutnya adalah menambah lokasi penelitian, dan menambah variabel independen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* ISSN :1979-4878 . Vol. 3, No.1. hal. 126 - 142
- Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review* Vol.1, NO.1, 2013
- Kahono, Sulud. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP. PBB Semarang ). Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X . Unhas Makassar 26-28 Juli 2007* hal. 1-41.
- Wulandari, Ika. 2010. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan). Skripsi Program Strata- 1 Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ veteran “ (tidak dipublikasikan ).
- Yadnyana, I Ketut Dan Ida Bagus Sudiksa. 2011. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Di Kota Denpasar. *ISSN : 0853-6422. Kertha Wicaksana Vol. 17 No. 2.* Hal 197-206.



Hak Kopi (*copy right*) atas Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi ada pada penerbit dengan demikian isinya tidak diperkenankan untuk dikopi atau di-*email* secara masal atau dipasang diberbagai situs tanpa ijin tertulis dari penerbit. Namun demikian dokumen ini dapat diprint diunduh, atau di-*email* untuk kepentingan atau secara individual.